

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALEMBANG DALAM MENANGANI ANAK
PUTUS SEKOLAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

UMMULIA ZAHRA KAMILA

NIM.07011381924197

**JURUSAN ILMU ADMINISRTASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ummulia Zahra Kamila

NIM : 07011381924197

Tempat dan Tanggal Lahir: Palembang, 21 Januari 2002

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Collaborative Governance Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam Menangani Anak Putus Sekolah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 21 Maret 2024

Ummulia Zahra Kamila
Materai Pernyataan,

METERAI
TEMPEL
811AAAKX842152094

Ummulia Zahra Kamila

NIM. 07011381924197

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DINAS
PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG DALAM
MENANGANI ANAK PUTUS SEKOLAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**UMMULIA ZAHRA KAMILA
NIM. 07011381924197**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 10 Januari 2024

Pembimbing

Annada Nasyaya, S.IP., M.SI

NIP. 198809062019032016



**Mengetahui,
Ketua Jurusan**


Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

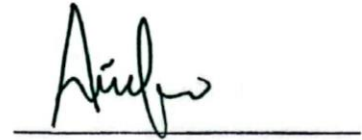
**COLLABORATIVE GOVERNANCE DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALEMBANG DALAM MENANGANI ANAK
PUTUS SEKOLAH**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 12 Januari 2024
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

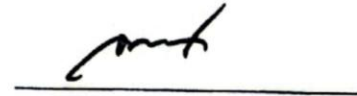
Annada Nasyaya, S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016
Ketua



M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001
Anggota



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001
Anggota



Mengetahui,



Ketua Jurusan
Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Success is not easy, but the feeling of achievement is worth every sacrifice.

- *Lando Norris*

Tell me we have it, tell me we have it!?!...VAMOS!!!

- *Carlos Sainz*

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Keluarga Ibu, Bapak dan Adik
2. Teman – teman seperjuangan selama perkuliahan
3. Almamater tercinta

ABSTRACT

This research aims to find out how Collaborative Governance of the Palembang City Education Office handles school dropout children as an answer to the problem of the high number of school dropouts in the city of Palembang and to realize zero dropout children in the city of Palembang. In this research, a qualitative research type is used which uses humans as instruments and is also adapted to natural situations in relation to data collection which is generally qualitative in nature and is a research procedure that produces descriptive data, namely data from people whose behavior can be observed. The data collection techniques used in this research are interviews, observations and documentation which are collected and then processed and used as the main raw material to analyze the conditions for the existence of research objectives at the locations studied. This research uses the Collaborative Governance theory by Ansell and Gash with the indicators used, namely Initial Conditions, Institutional Design, Facilitative Leadership and Collaboration Process. The results of the research show that the Collaborative Governance of the Palembang City Education Office in Handling Out- of-School Children is running less than optimally, this can be proven by the existence of several indicators that can be said to be running less well. It is hoped that a new MoU will be signed for the collaborating parties and a forum will be held for discussions between interested parties.

Keywords: *Collaborative Governance, children dropping out of school*

Advisor



Annada Nasyaya, S.IP., M.SI

NIP. 198809062019032016

Palembang, 10 January 2024
Chairman of Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA


NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Collaborative Governance* Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam Menangani Anak Putus Sekolah sebagai jawaban dari masalah tingginya angka anak putus sekolah di kota Palembang serta mewujudkan zero anak putus sekolah di kota Palembang. Dalam penelitian ini digunakan tiper penelitian kualitatif yang menjadikan manusia sebagai instrument dan juga disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif serta merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu merupakan data dari orang – orang berperilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dikumpulkan kemudian diolah dan dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash dengan indikator yang digunakan yaitu Kondisi Awal, Desain Lembaga, Kepemimpinan Fasilitatif dan Proses Kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam Menangani Anak Putus Sekolah berjalan dengan kurang maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya beberapa indikator yang dapat dikatakan berjalan dengan kurang baik. Diharapkan Dinas Pendidikan Kota Palembang melakukan penandatanganan MoU yang baru bagi pihak yang berkolaborasi serta diadakan forum untuk berdiskusi antara pihak yang memiliki kepentingan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Anak Putus Sekolah

Pembimbing



Annada Nasyaya, S.IP., M.SI

NIP. 198809062019032016

Palembang, 10 Januari 2024

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, kamrunia serta ridonya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Collaborative governance Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam Menangani Anak Putus Sekolah”. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi Sebagian dari persyaratan dalam menempuh derajat sarjana S-1 Ilmu Administrai Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penyusunan Skripsi penulis mendapatkan semangat, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga semua hambatan dan kesulitan dapat dilewati dengan baik. oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Ermawan S.Pd dan Bapak Suropto serta saudari tersayang Raisyah Alfalah yang selalu mondoakan, menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
2. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Ibu **Dr. Nengyanti, M.Hum.** selaku Dosen pembimbing akademik.
4. Ibu Annada Nasyaya, S.IP., M.Si selaku Dosen pembimbing Skripsi, terima kasih atas segala kesabaran dan bimbingannya dalam proses penyusunan Skripsi ini dari awal sampai akhir.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff FISIP Unsri.
6. Bapak Amirul Insan selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Palembang.
7. Bapak Enos Fredik selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palembang.
8. Ibu Yuli Lastari selaku Kepala Bagian Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.

9. Bapak Agusti selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang.
10. Bapak Nindi selaku Kepala Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

Penulis menyadari bahwa Sripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun Teknik penulisan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pemabaca untk diperbaiki dimasa yang akan mendatang. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua.

Palembang, 12 Januari 2024



Ummulia Zahra Kamila

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINILITAS.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13

2.1.1 Konsep <i>Collaborative</i>	13
2.1.2 Komponen <i>Collaborative</i>	14
2.1.3 Karakteristik <i>Collaborative</i>	20
2.1.4 <i>Collaborative Governance</i>	20
2.1.5 Pendidikan.....	26
2.1.6 Anak Putus Sekolah	28
2.1.7 Program Penanganan Anak Putus Sekolah	28
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Definisi Konsep.....	40
3.3 Fokus Penelitian	41
3.4 Jenis dan Sumber Data	42
3.5 Informan Penelitian.....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	43
3.8 Jadwal Penelitian.....	45
3.9 Sistematika Penelitian	45
BAB IV	47
PEMBAHASAN	47
4.1 Profil Dinas Pendidikan Kota Palembang.....	47
4.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Palembang	48
4.2.1 Visi Dinas Pendidikan Kota Palembang	48

2.4.2 Misi Dinas Pendidikan Kota Palembang.....	48
2.4.3 Tujuan dan Sasaran	48
4.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Palembang.....	49
4.3.1 Uraian Tugas	50
4.4 Collaborative Governance Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam Penanganan Anak Putus Sekolah	55
4.4.1 Kondisi Awal	56
4.4.1.1 Sejarah Kerjasama Masa Lalu.....	57
4.4.1.2 Kondisi Anak Putus Sekolah Sebelum adanya Sekolah.....	58
4.4.2 Kepemimpinan Fasilitatif.....	60
4.4.2.1 Peran pihak terlibat	61
4.4.2.2 Komitmen.....	63
4.4.3 Desain Kelembagaan.....	65
4.4.3.1 Aturan Dasar.....	65
4.4.4 Proses Kolaboratif.....	69
4.4.4.1 Dialog tatap Muka.....	70
4.4.4.2 Membangun Kepercayaan dalam Penanganan Anak Putus Sekolah.....	72
4.4.4.3 Komitmen pada Proses Kolaborasi Penanganan Anak Putus Sekolah.....	73
4.4.4.4 Pemahaman Bersama dalam Penanganan Anak Putus Sekolah.....	75
4.4.4.5 Dampak Sementara Dalam Penangan Anak Putus Sekolah.....	77
4.4.5 Pembahasan.....	79
BAB V.....	85
PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Table 1 Jumlah anak putus sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2016/2017 sampai dengan Tahun ajaran 2020/2021	4
Table 2 Jumlah anak putus sekolah Kota Palembang dari Tahun 2018 – 2022	5
Table 3 Daftar pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Filial bagi anak jalanan dan anak putus sekolah.....	7
Table 4 Penelitian Terdahlu.....	30
Table 5 Fokus Penelitian	41
Table 6 Jadwal Penelitian.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008).....	22
Gambar 2 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 3 Logo Dinas Pendidikan Kota Palembang.....	47
Gambar 4 MoU Dinas Sosial Kota Palembang.....	66
Gambar 5 MoU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.....	67
Gambar 6 MoU Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang.....	68
Gambar 7 MoU Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.....	68
Gambar 8 Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2020.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Pedoman Wawancara.....	92
Lampiran 2 Dokumentasi Saat wawancara Bersama informan.....	94
Lampiran 3 Surat izin penelitian dari Universitas Sriwijaya	96
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Badan KESBANGPOL Kota Palembang.....	101
Lampiran 5 Surat izin tugas Pembimbing Skripsi.....	105
Lampiran 6 Halaman persetujuan Usulan Penelitian	106
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi	107
Lampiran 8 Lembar Perbaikan seminar proposal Skripsi	108

DAFTAR SINGKATAN

1. ANJAL : Anak Jalanan
2. APS : Anak Putus Sekolah
3. DINSOS : Dinas Sosial
4. DISDIK : Dinas Pendidikan
5. KEMDIKBUD : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. KIP : Kartu Indonesia Pintar
7. MOU : *Memorandum of Understanding*
8. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
9. PERWALI : Peraturan Walikota
10. PKBI : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
11. POLTABES : Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah
12. SD : Sekolah Dasar
13. SDG's : *Sustainable Development Goals*
14. SMA : Sekolah Menenga Atas
15. SMP : Sekolah Menengah Pertama
16. UU : Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) disusun untuk kelanjutan dari Milineum Development Goals (MDGs) yang masih belum tergapai tujuannya hingga pada akhir tahun 2015. SDGs merupakan sebuah rencana aksi yang ditujukan kepada umat manusia ,planet kemudian juga untuk kemakmuran. Ini juga bertujuan dalam memperkuat perdamaian secara universal dalam hal kebebasan yang luas kemudian dari itu untuk mengentaskan kemiskinan yang parah merupakan sebuah rintangan global yang paling besar dan juga merupakan prasyarat yang tidak dapat dilakukan untuk pembangunan berkelanjutan(Bappenas 2015).

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah arah pembangunan global pada masa yang menawarkan wacana baru tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan alam bagi generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan merupakan usaha dari manusia dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dengan terus berupaya untuk tidak melampaui ekosistem penyangga kehidupan. Saat ini, isu Pembangunan berkelanjutan sudah menjadi isu penting yang harus disosialisasikan kepada Masyarakat (Rahadian, 2016). Pembangunan berkelanjutan melibatkan banyak bidang, termasuk salah satunya bidang pendidikan. Pendidikan merupakan komponen penting dalam sebuah proses pembangunan berkelanjutan, khususnya pembangunan yang berkaitan dengan manusia (society). Pembangunan manusia merupakan bagian penting dari investasi yang dibutuhkan suatu negara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi (Simanjuntak et al., 2017). Pendidikan merupakan investasi yang dipersiapkan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa, yang nantinya akan mengejar peningkatan ekonomi baik itu secara individu untuk keluarganya maupun secara kolektif untuk masyarakatnya (termasuk juga untuk kepentingan orang lain atau kepentingan pembangunan nasional), sehingga pendidikan dijadikan pondasi untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan industri dan juga perbaikan ekonomi (Lemos & Agrawal, 2006).

Pendidikan sendiri akan menjadi dasar dari upaya pemerintah untuk memajukan Tujuan dan target Pembangunan Berkelanjutan 2030, seperti yang diarahkan oleh Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. dengan Meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia nantinya akan mempercepat kemajuan menuju tujuan dan sasaran SDG lainnya, terlebih dalam memerangi kemiskinan. Pendidikan merupakan bagian dari amanat UUD 1945 di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya memberikan pendidikan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia (Gunawan et al., 2020).

Kemajuan sebuah negara terdapat dalam kualitas sumber daya manusia dan pendidikan yang nantiinya berperan penting dalam membangun sumber daya yang berkualitas, dan juga modal untuk melahirkan masa depan yang berkelanjutan diperlukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang produktif dan berdaya saing, serta mampu bersaing di pentas dunia. Program SDGS, dengan tujuan membangun pendidikan yang berkualitas, telah mengembangkan 10 tujuan yang dirancang, salah satunya yaitu untuk menetapkan bahwa semua anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan dengan upaya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, sebagian besar program ini juga akan menambah penyediaan kualitas guru pendidikan, guna mencapai tujuan pembangunan pendidikan (Thamrin, 2020), program SDGS ini sangat luar biasa, dan sangat diharapkan pemerintah dan juga masyarakat dapat bersinergi untuk memanifestasikan SDGS 2030 khususnya pada bidang pendidikan.

Collaborative governance secara luas diartikan sebagai proses dan juga struktur dalam pengambilan Keputusan dan manajemen kebijakan public yang melibatkan orang – orang secara konstruktif melewati batas – batas dari Lembaga publik, pemerintah atau ruang public, swasta dan sipil untuk melaksanakan tujuan public yang tidak dapat dicapai dengan cara lain. (Emerson et al., 2012). Menurut administrasi publik, pemerintahan kolaboratif adalah model tata kelola strategis yang di mana berbagai pihak dapat bekerja sama dengan pejabat pemerintah dalam forum pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah sendiri. Paradigma New Public Service (NPS) menggambarkan governance sebagai tingkat penggunaan otoritas dalam berbagai bidang untuk memecahkan masalah masyarakat dengan

mempertimbangkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partisipasi publik dalam mencapai kesepakatan bersama.

Collaborative governance timbul sebagai jawaban atas tidak sempurnanya cara pembuatan dan juga implementasi kebijakan yang tidak sesuai dengan manajerial (Ansell & Gash, 2008). Ini mengartikan bahwa kolaborasi terjadi dikarenakan adanya inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong adanya kolaborasi dan juga koordinasi untuk menjawab masalah yang dihadapi publik saat ini. Collaborative governance merupakan strategi untuk mengatasi banyaknya tantangan public dan Masyarakat yang sulit diatasi oleh karena itu ini dianggap penting dan perlu (Agranoff & McGuire, 2003). Studi kolaborasi antara pemangku kepentingan mengartikan bahwa pemerintah bekerjasama dengan berbagai Lembaga dan juga warga negara untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif bagi semua kalangan.

Indonesia menempati urutan ke 12 dari 12 negara di Asia dalam kualitas pendidikan menurut survei dari Political and Economic Risk Consultant (PERC) yang mana posisi Indonesia sendiri berada di bawah dari Vietnam. Data yang dibagikan oleh The World Economic Forum Swedia (2000), warga negara Indonesia memiliki daya saing yang kecil, hanya menempati peringkat 37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Namun, menurut survei oleh organisasi yang sama, Indonesia hanya dianggap sebagai pendatang baru daripada pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Memulai abad ke- 21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi ricuh. Kericuhan ini bukan karena tingginya mutu pendidikan nasional tetapi karena persepsi bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. hal ini menyebabkan sesuatu yang mendasar (Agustang & Asrifan, n.d.). Salah satunya setelah memasuki abad 21, gelombang globalisasi sangat terasa dan meluas. Kemajuan teknologi dan juga perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sendirian. Indonesia telah berada di tengah dunia baru, dunia terbuka di mana orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain.

Kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak tinggi itu kemudian ditampakkan pada data Balitbang (2003) yakni dari 146.052 SD di Indonesia dalam realitanya hanya delapan sekolah saja yang memperoleh pengakuan dari dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Kemudian dari 20.918 SMP di Indonesia dalam realitanya juga

hanya delapan sekolah yang memperoleh validasi dari dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA pada kenyataannya hanya terdapat tujuh sekolah saja yang mendapat validasi dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). kecilnya mutu pendidikan di Indonesia disebabkan antara lain oleh masalah efisiensi, efektifitas dan standarisasi pengajaran. Ini masih soal pendidikan di Indonesia pada umumnya. Masalah khusus pada dunia pendidikan diantara lain yaitu kurangnya pemerataan pendidikan, kurangnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan juga mahalnya biaya pendidikan. (Agustang & Asrifan, n.d.).

Table 1 Jumlah anak putus sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2016/2017 sampai dengan Tahun ajaran 2020/2021

NO	TAHUN AJARAN	SD	SMP	JUMLAH
1	2016/2017	1.948	1.274	3.222
2	2017/2018	2.134	1.855	3.989
3	2018/2019	3.053	3.021	6.074
4	2019/2020	2.699	1.133	3.832
5	2020/2021	1.541	369	1.910

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera

Selatan, 2021

Berdasarkan Statistik data Kemdikbud Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Ajaran 2020/2021 memasuki 10 besar Provinsi dengan tingkat Anak Putus sekolah terbanyak dengan jumlah 2.562 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 1.910 anak merupakan anak tidak aktif sekolah pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Kemudian pada Tahun ajaran 2018/2019 Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah anak putus sekolah yang sangat besar. Untuk Kota Palembang Sendiri pada Tahun ajaran tersebut memiliki total anak putus sekolah sebanyak 1.278 kasus atau mencapai 17% dari jumlah kasus anak putus sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan(BDSP-K).

Table 2 Jumlah anak putus sekolah Kota Palembang dari Tahun 2018 – 2022

NO	TAHUN	SD	SMP	JUMLAH
1.	2018	249	287	536
2.	2019	204	84	288
3.	2020	447	98	545
4.	2021	307	24	331
5.	2022	179	45	224

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemdikbud

Berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah yang diterbitkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan Kota Palembang pada tahun 2018 memiliki 536 anak yang putus sekolah, kemudian berkurang pada tahun 2019 menjadi 288 anak yang putus sekolah dimana pada tahun 2019 Dinas Pendidikan Kota Palembang memulai program Sekolah filial bagi anak jalanan dan putus sekolah. Kemudian pada tahun 2020 angka anak putus sekolah kota Palembang kembali melonjak sebanyak 545 anak yang di akibatkan oleh pandemi covid-19 dan kembali menurun pada tahun 2021 dan juga 2022. Dinas pendidikan kota Palembang sendiri memiliki target untuk mewujudkan zero anak putus sekolah di kota Palembang.

Mengingat salah satu kebutuhan pokok manusia adalah pendidikan, yang memiliki kedudukan yang sama dengan kebutuhan manusia terhadap pangan dan sandang. Saat ini ternyata sebagian masyarakat masih belum dapat menyelesaikan studinya pada jenjang, jenis dan struktur lembaga pendidikan yang berbeda karena berbagai alasan.

Mereka akhirnya harus putus sekolah, antara lain karena faktor finansial dan keuangan. Saat ini pemerintah Republik Indonesia, khususnya dalam kerangka pemerintah daerah, sedang mengupayakan dimulainya pendidikan umum gratis untuk mengantisipasi tingginya angka putus sekolah, terutama karena keterbatasan dana, dan karena alasan finansial.(Al et al., 2013).

Banyak aspek yang mempengaruhi suspensi, aspek itu berasal dari dalam diri anak dapat berupa aspek psikis atau aspek fisik. Faktor psikologis anak, seperti rendahnya kemauan belajar dari siswa atau depresi karena tidak dapat mengikuti pembelajaran sedangkan untuk faktor fisik seperti rusak karena kecelakaan atau sakit berkepanjangan, dan lainnya.(Budi Lestari et al., 2020). Faktor yang berasal dari luar diri anak juga merupakan faktor yang tidak kalah penting yaitu faktor keuangan keluarga, keadaan keluarga (perceraian orang tua) dan faktor lainnya. Menurut Menurut (Mcmillen, 1997) Putus sekolah dini memiliki dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor-faktor yang menyebabkan putus sekolah lebih awal seperti: Kemalasan anak, hobi bermain, minat belajar anak yang rendah, hubungan orang tua yang kurang baik, latar belakang pendidikan orang tua atau lingkungan yang kurang baik seperti jarak antara rumah dan sekolah.

Pada dasarnya memang, kemajuan dan dunia globalisasi telah berdampak kuat dalam masalah putus sekolah, narkoba dan kecanduan lainnya, homoseksualitas, kenakalan, dan banyak lagi. (Ali 1998). Fenomena perilaku negatif lainnya yang terdapat pada generasi muda akibat putus sekolah adalah timbulnya pengangguran yang dapat menggiring mereka pada tindakan kriminal dan pelanggaran moral agama. Bahkan menurut laporan dari *United Nation Congres of The Prevention of Crime* yang melakukan pertemuan di London pada tahun 1990-an melaporkan bahwa terdapat kenaikan signifikan jumlah putus sekolah (Kartini Kartono, 1992). kenyataan ini kemudian menampakkan jika segala macam tindak kejahatan bagi mereka yang putus sekolah semakin bertambah berbarengan dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi (Al et al., 2013).

Melihat masih banyaknya angka anak yang putus sekolah di kota Palembang maka dinas pendidikan membuat program sekolah filial bagi anak jalanan dan anak putus

sekolah. Dimana dalam menjalankan program sekolah filial ini Dinas Pendidikan Kota Palembang berkolaborasi dengan Organisasi perangkat Daerah dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sekolah Filial Bagi Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah pada Pasal 14 Ayat 1 dan 2. Disitu dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan sekolah filial bagi anak jalanan dan anak putus sekolah, Dinas Dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan dilaksanakan melalui mekanisme perjanjian Bersama berdasarkan ketentuan peraturan undang – undang.

Table 3 Daftar pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Filial bagi anak jalanan dan anak putus sekolah

NO	PIHAK TERKAIT	PERAN
1.	Dinas Pendidikan Kota Palembang	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi Hak Pendidikan bagi anak jalanan dan anak putus sekolah yang dibina dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang. b. Memenuhi persyaratan aspek substansi materi muatan maupun aspek yuridis formal dari terselenggaranya kegiatan program pemenuhan hak Pendidikan dari anak jalanan dan anak putus sekolah. c. Memenuhi aspek sarana dan prasarana terselenggaranya program pemenuhan hak Pendidikan sekolah filial bagi anak jalanan dan anak putus sekolah.
2.	Dinas Sosial Kota Palembang	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi Hak Pendidikan bagi anak jalanan dan anak putus sekolah yang dibina dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial

NO	PIHAK TERKAIT	PERAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Memenuhi persyaratan aspek substansi materi muatan maupun aspek yuridis formal dari terselenggaranya kegiatan program pemenuhan hak Pendidikan dari anak jalanan dan anak putus sekolah. c. Membantu menjaring anak jalanan dan anak putus sekolah agar dapat direkrut menjadi peserta didik sekolah filial. d. Membantu menangani berbagai persoalan sosial yang berhubungan dengan anak jalanan dan anak putus sekolah di kota Palembang.
3.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi Hak Pendidikan bagi anak jalanan dan anak putus sekolah yang dibina dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang. b. Memenuhi persyaratan aspek substansi materi muatan maupun aspek yuridis formal dari terselenggaranya kegiatan program pemenuhan hak Pendidikan dari anak jalanan dan anak putus sekolah. c. Memberi perlindungan terhadap anak jalanan dan anak putus sekolah melalui program dan regulasi dari dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.

NO	PIHAK TERKAIT	PERAN
		<p>d. Mensinergikan program Pendidikan Layak anak bagi anak jalanan dan anak putus sekolah.</p>
4.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang	<p>a. Memenuhi Hak Pendidikan bagi anak jalanan dan anak putus sekolah yang dibina dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang.</p> <p>b. Memenuhi persyaratan aspek substansi materi muatan maupun aspek yuridis formal dari terselenggaranya kegiatan program pemenuhan hak Pendidikan dari anak jalanan dan anak putus sekolah.</p> <p>c. Memberikan program pelatihan berbagai keterampilan dan keahlian siap kerja bagi peserta didik sekolah filial.</p> <p>d. Membuka informasi akses dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri dalam memberikan pemenuhan hak pelatihan bagi anak sekolah filial.</p>
5.	PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya	<p>a. Memenuhi Hak Pendidikan bagi anak jalanan dan anak putus sekolah yang dibina dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan.</p> <p>b. Memenuhi persyaratan aspek sarana dan prasarana terselenggaranya kegiatan program pemenuhan hak Pendidikan sekolah filial bagi anak jalanan dan anak putus sekolah.</p>

NO	PIHAK TERKAIT	PERAN
6.	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Provinsi Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi Hak Pendidikan bagi anak jalanan dan anak putus sekolah yang dibina dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. b. Memenuhi persyaratan aspek substansi materi muatan maupun aspek yuridis formal dari terselenggaranya kegiatan program pemenuhan hak Pendidikan dari anak jalanan dan anak putus sekolah. c. Membantu menjaring anak jalanan dan anak putus sekolah untuk dapat direkrut menjadi peserta didik sekolah filial. d. Memberikan pendampingan konseling dan penguatan karakter bagi peserta didik sekoah filial. e. Memberikan laju mobile klinik bagi anak jalanan dan anak putus sekolah.

Sumber: Diolah oleh peneliti, tahun 2023

Table diatas merupakan daftar pihak yang berkontribusi dalam program sekolah filial sebagai penanganan masalah anak putus sekolah di kota Palembang berdasarkan MoU dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Dari organisasi perangkat daerah serta Lembaga swadaya Masyarakat memiliki peran untuk memenuhi hak Pendidikan bagi anak anak yang putus sekolah di kota Palembang. Kemudian dinas Pendidikan sendiri selaku penyelenggara program sekolah filial itu menyediakan sarana dan prasarana untuk terselenggaranya program ini. Dinas sosial kota Palembang sebagai penjaring anak jalanan dan juga anak putus sekolah di kota Palembang agar direkrut sebagai siswa siswi sekolah filial, Dinas perlindungan anak memiliki peran unutk memberi perlindungan terhadap anak jalanan dan anak putus sekolah berdasarkan regulasi dari dinas

perlindungan anak, kemudian dari Dinas Ketenagakerjaan mempunyai peran untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi peserta didik sekolah filial, lalu ada Perkumpulan keluarga berencana Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki peran untuk memberikan pendampingan konseling dan penguatan karakter bagi peserta didik sekolah filial.

Dalam menjalankan program sekolah filial untuk menangani masalah anak putus sekolah di Kota Palembang, Dinas Pendidikan Kota Palembang memerlukan mitra untuk diajak bekerja sama termasuk didalamnya pemerintahan kota Palembang sendiri dan juga Lembaga swadaya masyarakat. Berdasarkan uraian terkait permasalahan Anak putus sekolah di Kota Palembang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Collaborative governance Dinas Pendidikan kota Palembang dalam Menangani Anak Putus Sekolah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :”**Bagaimana Collaborative Governance Dinas Pendidikan Kota Palembang Dalam Menangani Anak Putus Sekolah?**”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, pelaksanaan Collaborative Governance dari Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam Menangani Anak Putus Sekolah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya Peran Pemerintah dalam mengatasi masalah disektor Pendidikan; dan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga wawasan kepada Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam mengatasi masalah anak putus sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). Collaboration at the Core. In *Collaborative Public Management* (pp. 1–19). Georgetown University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt2tt2nq.4>
- Agustang, A., & Asrifan, A. (n.d.). *Masalah Pendidikan di Indonesia Oleh*.
- Al, J., Dahlan, M., Sekolah, T., Agama, T., & Negeri, I. (2013). *Problematika Putus Sekolah dan Pengangguran (Analisis Sosial Pendidikan) Problematika Putus Sekolah Dan Pengangguran (Analisis Sosial Pendidikan)* (Vol. 20).
- Anggraini, N. W., & Mashur, D. (2022). (2022) JANUARY-MARCH Available online at. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(1). <https://doi.org/10.35308/xxxxx>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ardinda, A. A., & Salomo, R. V. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SEKOLAH FILIAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(1), 72. <https://doi.org/10.31289/publika.v7i1.2465>
- Birokrasi, J., dan Pelayanan Publik, K., Trytami, A., Fitri Meutia, I., & Karmilasari, V. (2022). *Sistem Kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Palembang (Studi Pada Sekolah Filial ANJAL dan APS)*.
- Bromiley, P. (1996). *The Organizational Trust Inventory (OTI): Development and Validation*. <https://www.researchgate.net/publication/232553329>
- Budi Lestari, A. Y., Kurniawan, F., & Bayu Ardi, R. (2020). Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 4(2), 299. <https://doi.org/10.23887/jisd.v4i2.24470>
- Denett, P., Evans, K., Shea, R., Thomas, S., Allen, T. W., Bourgeois, D. J., Carbonell, J. G., Evans, K. S., Gray, G. M., Harvey, J. C., Jones, S. L., David, R., & Pittman, P. R. A. (n.d.). 3 *From the Editor's Keyboard* 4 *Conversations with Leaders A Conversation with Rob Portman and Clay Johnson III A Conversation with Linda Combs 18 Profiles in Leadership*. www.businessofgovernment.org
- Dewy, R., Lionardo, A., & Wulandari, N. (2022). Efektivitas Inovasi Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah bagi Anak Jalanan dan Putus Sekolah di Kota Palembang. *Tanah Pilih*, 2(1), 15–28. <https://doi.org/10.30631/tpj.v2i1.931>
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:218149747>

- Elisabeth, D., Universitas, S., Raja, M., Haji, A., & Raja, U. M. (n.d.). *PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SDGs 2030 Goals 4 ENSURE INCLUSIVE AND EQUITABLE QUALITY EDUCATION AND PROMOTE LIFELONG LEARNING OPPORTUNITIES FOR ALL "Memastikan kualitas pendidikan yan... Merliana Marchelina Hawa*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11219.96809>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Faturachman, O. :, Sudirman, A., Basri, M., Huda, K., & Upe, A. (n.d.). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)*.
- Febrian, R. A. (2015). *Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teortis)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:157494871>
- Gazley, B., & Brudney, J. L. (2007). The Purpose (and Perils) of Government-Nonprofit Partnership. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 36(3), 389–415. <https://doi.org/10.1177/0899764006295997>
- Gunawan, J., Permatasari, P., & Tilt, C. (2020). Sustainable development goal disclosures: Do they support responsible consumption and production? *Journal of Cleaner Production*, 246, 118989. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2019.118989>
- Hening, R., Ratna Puji, A., Fakultas, D., Universitas, E., & Purwokerto, W. (n.d.). *KONDISI PSIKOLOGIS ANAK PUTUS SEKOLAH*.
- Ihsan, F. (1997). *Dasar - dasar Kependidikan*. Penerbit Rineka Cipta.
- Kartini Kartono. (1992). *Patologi sosial 2 : kenakalan remaja* (firsrt edition). Rajawali. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=7587>
- Keban, Y. T. (2004). *Enam dimensi strategis administrasi publik : konsep, teori dan isu*. Gava Media.
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 31, 297–325. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.31.042605.135621>
- Liani, T., & Marpaung, J. (2019). FAKTOR PENYEBAB ANAK PUTUS SEKOLAH CAUSATIVE FACTORS OF THE CHILDREN DROP OUT OF SCHOOL. *CAHAYA PENDIDIKAN*, 5(2), 13–24. http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_FC1DCA36-A9D8-4688-8E5F-
- Mariana, J., Dosen, T., Tinggi, S., Kesejahteraan, I., Debby, S., & Rende, C. (2015). *PERAN KELUARGA TERHADAP MASA DEPAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI*

DESA DAPALAN KECAMATAN TANPA NAMMA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. *Journal Social Welfare*, 3, 63.

- Mcmillen, M. (1997). *NATIONAL CENTER FOR EDUCATION STATISTICS Statistical Analysis Report Dropout Rates in the United States, 1996*. <http://nces.ed.gov>
- Mujiati, M., Nasir, N., & Ashari, A. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 18(3). <https://doi.org/10.30651/didaktis.v18i3.1870>
- Nurlaila, S., Dadi, S., & Karjiati, V. (n.d.). *Pengaruh Model Cooperative Learning Tipe Teams Games Tournaments (TGT) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Di Kelas IV SDN Gugus X kota Bengkulu*.
- Rahadian, A. H. (2016). STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Prosiding Seminar STIAMI*, III(01).
- Roberts, D., Van Wyk, R., & Dhanpat, N. (2016). *EXPLORING PRACTICES FOR EFFECTIVE COLLABORATION*.
- Sabaruddin, A. (2015a). *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik : Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Graha Ilmu.
- Sabaruddin, A. (2015b). *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik : Teori, Konsep Dan Aplikasi*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:151507832>
- Sedarmayanti. (2003). *Good governance (pemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:159965293>
- Simanjuntak, J., Ratnawati, T., & Rahmiyati, N. (2017). Economic Growth as Mediation of Regional Own Source Revenue, Investment and Asset Management on Labor Absorption and Social Welfare in Regencies/Cities in Riau Islands Province. *International Journal of Economics and Finance*, 9(8), 127. <https://doi.org/10.5539/ijef.v9n8p127>
- Sudarmo. (2011). *Isu Isu Administrasi Publik*. Smart Media.
- Thamrin, Husni. (2020). Educational Aspects in Efforts to Realize SDGs in Indonesia. *Journal of Advances in Education and Philosophy*, 4(11), 473–477. <https://doi.org/10.36348/jaep.2020.v04i11.007>
- Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration Processes: Inside the Black Box. *Public Administration Review*, 66(s1), 20–32. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x>
- Udiani, N. (2016). *Kolaborasi Perencanaaa (Studi Kasus Pengembangan UMKM di Kabupaten Maros)*. Universitas Hasanudin.

Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). *ENVIRONMENTAL GOVERNANCE ; ISU, KEBIJAKAN, DAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:169106281>

Yahya, H. (n.d.). Collaborative Governance dalam Program “EPPSON” Sebagai Perwujudan Smart City di Kota Surakarta. In *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* (Vol. 2, Issue 1).